

**PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RESIKO
KREDIT MACET PADA BPR KONVENSIONAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh:

TESA UCI YUGITA
2014/14060052

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018

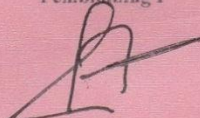
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RESIKO
KREDIT MACET PADA BPR KONVENSIONAL DI INDONESIA

Nama : Tesa Uci Yugita
NIM/TM : 14060052/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Moneter
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

Pembimbing II



Dr. Alpon Satriyanto, SE, ME
NIP. 19850909 201404 1 002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

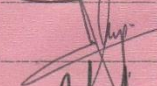
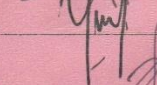
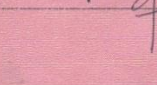
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RESIKO
KREDIT MACET PADA BPR KONVENSIONAL DI INDONESIA**

Nama : Tesa Uci Yugita
NIM/TM : 14060052/2014
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Moneter
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Drs. Ali Anis, MS	1. 
2	Sekretaris	: Dr. Alpon Satrianto, SE, ME	2. 
3	Anggota	: Yewiwati SE, ME	3. 
4	Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Tesa Uci Yugita
NIM / TahunMasuk : 14060052 / 2014
Tempat / TanggalLahir : Padang/ 6 Juni 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi moneter
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Jondul 1 Blok J/3 Kec Koto Tengah
No. HP / Telepon : 081276411229
JudulSkripsi : Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap
Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional
di Indonesia

Denganiniinyatakanbahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 2 / 22018
Yang menyatakan,



Tesa Uci Yugita
NIM. 14060052/2014

RINGKASAN

Tesa Uci Yugita (14060052/2014) : Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia. Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara kebijakan *Loan to Value* (LTV), suku bunga kredit konsumsi (SBKK) dan rasio modal (CAR) terhadap resiko kredit macet (NPL) pada BPR Konvensional di Indonesia.

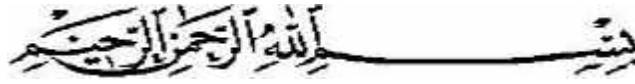
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data *time series* berupa data kuartalan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan LTV, SBKK, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap NPL BPR Konvensional di Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Secara parsial variabel LTV berpengaruh positif signifikan, SBKK berpengaruh positif signifikan dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPL BPR Konvensional di Indonesia tahun 2009 – 2016.

Untuk kedepannya disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain diluar variabel penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Bank Indonesia sebaiknya menurunkan kebijakan LTV yang ditetapkan untuk BPR Konvensional agar semakin besar dp/uang muka yang dibayarkan si peminjam sehingga menurunkan resiko kredit macet. Selain itu Bank Indonesia juga perlu membuat kebijakan yang dikhususkan untuk tipe rumah tertentu untuk menjaga kondisi bisnis properti dimasa yang akan datang. Bagi pihak BPR Konvensional agar menurunkan tingkat suku bunga kredit konsumsi yang ditetapkan agar lebih bersaing dibandingkan bank-bank lain, sehingga masyarakat lebih berminat untuk melakukan pinjaman pada BPR Konvensional dan mendorong pertumbuhan kredit yang selanjutnya mengurangi resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Terakhir, bagi pihak BPR Konvensional agar meningkatkan kualitasnya dalam penambahan modal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengusahakan setiap aset yang beresiko menghasilkan pendapatan, sehingga tidak perlu menekan permodalan.

Kata Kunci : *Non Performing Loan, Loan to Value, Suku Bunga Kredit Konsumsi, Capital Adequacy Ratio*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak terhadap hamba-Nya, serta shalawat untuk nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan izin Allah sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut diatas dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME selaku pembimbing II penulis yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu penguji skripsi yaitu Ibu Yewiwati SE, ME dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, MM

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada ayah dan ibu tersayang yaitu Drs. Mohd Nasir B dan Asnimar Salam yang telah memberikan doa setiap saat serta dalam setiap sujudnya juga dukungan kepada penulis baik moril maupun materil dan semangat yang selalu terbawa melalui perantara doa. Terimakasih Ibu dan Bapak atas segala pengorbanan dan perjuangan yang hingga bercucuran keringat dan air mata serta jasa yang tak terhingga dan tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
9. Kepada Abang tercinta Deri Febri Jusipa S.St dan Kakak tersayang Rezi Novia Riska, SE, Mike Destri Dora S.Ap, dan Widia Pita Loka S.Pd yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada rekan- rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 tanpa terkecuali dan senior-senior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu dan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi Moneter dan sahabat-sahabat terdekat angkatan 2014 yang telah mendukung, memberi semangat dan membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS....	 14
A. Kajian Teori	14
1. Kebijakan Makroprudensial.....	14
2. Konsep Perbankan	18
3. Resiko Kredit Macet (<i>Non Performing Loan</i>)	23
4. Pengaruh Kebijakan <i>Loan To Value</i> Terhadap Resiko Kredit Macet.....	29
5. Pengaruh Suku Bunga Kredit Konsumsi Terhadap Resiko Kredit Macet.....	31
6. Pengaruh Rasio Modal Terhadap Resiko Kredit Macet.....	36
B. Penelitian Relevan	38
C. Kerangka Konseptual	40
D. Hipotesis	42
 BAB III METODE PENELITIAN	 44
A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	44
1. Berdasarkan Cara Memperolehnya.....	44
2. Berdasarkan Waktu Pengumpulan Data	44
3. Berdasarkan Sifat	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Defenisi Operasional.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
1. Analisis Deskriptif	47
2. Analisis Induktif.....	47
3. Pengujian Hipotesis	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	54
2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	58
3. Analisis Induktif.....	70
4. Uji Hipotesis	75
B. Pembahasan	79
1. Kebijakan <i>Loan to Value</i> Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia	79
2. Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumsi Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia	81
3. Tingkat Rasio Modal Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia	83
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 86
A. Simpulan	86
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA	 89
 LAMPIRAN.....	 92

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Pada Bank Umum Konvensional, BPR Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2016.....	2
2. Nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Pada BPR Konvensional di Indonesia Tahun 2008-2016	3
3. Perkembangan Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Pada BPR Konvensional di Indonesia Tahun 2009-2016.....	5
4. Ketentuan Kebijakan <i>Loan To Value</i> di Indonesia Tahun 2012-2016.....	7
5. Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumsi Pada BPR Konvensional di Indonesia Tahun 2009-2016.....	9
6. Nilai <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Pada BPR Konvensional di Indonesia Tahun 2009-2016.....	11
7. Nilai Durbin Watson	50
8. Perkembangan Nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) pada BPR Konvensional (Y) Tahun 2009 kuartal 1-Tahun 2016 kuartal 4.....	59
9. Ketentuan Kebijakan <i>Loan to Value</i> di Indonesia (X1) Tahun 2012-2016.....	62
10. Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumsi BPR Konvensional (X2) Tahun 2009 kuartal 1-Tahun 2016 kuartal 4.....	65
11. Perkembangan Nilai <i>Capital Adequacy Ratio</i> BPR Konvensional (X3) Tahun 2009 kuartal 1-Tahun 2016 kuartal 4.....	68
12. Hasil Regresi OLS.....	70
13. Hasil Uji Normalitas.....	72
14. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji <i>Glejser</i>	73
15. Hasil Uji Multikolonearitas.....	74
16. Tabel t.....	92

17. Tabel F.....	93
18. Tabel Durbin Watson.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

1. Kurva Penawaran Kredit.....32
2. Kerangka Konseptual Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia.....42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji <i>Glejser</i>	91
2. Table t.....	92
3. Table F.....	93
4. Tabel Durtbin-Watson.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia, stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kemajuan ekonomi. Untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tangguh perlu dilakukan pemantauan terhadap gejala-gejala yang dapat menimbulkan krisis termasuk melakukan proyeksi secara reguler apakah terdapat potensi resiko yang membahayakan.

Secara umum sumber instabilitas dibagi dua yaitu resiko yang timbul diluar sektor keuangan seperti gangguan karena ekonomi makro dan resiko yang berada dalam sektor keuangan itu sendiri (perbankan) seperti resiko kredit macet. Dalam dua tahun terakhir kondisi industri perbankan Indonesia mengalami pelemahan fungsi intermediasi. Hal ini terlihat dari akselerasi pertumbuhan kredit perbankan nasional yang menurun, yaitu dari 10-12 persen menjadi 8-9 persen, selain itu tingkat rasio kredit macet perbankan yang dicerminkan dari nilai *Non Performing Loan* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 2,49 persen menjadi 2,93 persen (Bank Indonesia 2017). Nilai *Non Performing Loan* ini adalah indikator yang mengukur resiko kredit macet yang merupakan rasio perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang menggambarkan kesehatan atau performa kredit dari suatu bank.

Meningkatnya rasio kredit macet perbankan menunjukkan bahwa semakin seringnya terjadi kemacetan dalam proses pembayaran kredit yang menimbulkan kerugian pada bank sehingga bank menjadi *collapse*. Selain itu, jumlah rasio kredit macet yang terlalu besar juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan dapat menghancurkan perekonomian. Jadi, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kredit macet dalam perbankan.

Tabel 1 :
Nilai *Non Performing Loan* (NPL) Pada Bank Umum Konvensional dan BPR Konvensional Tahun 2009-2016

Tahun	Bank Umum Konvensional (%)	BPR Konvensional (%)
2009	3,31	6,90
2010	2,56	6,12
2011	4,26	5,22
2012	3,08	4,75
2013	2,75	4,45
2014	1,89	4,76
2015	2,58	5,40
2016	2,66	6,54
Rata-Rata	2,88	5,51

Sumber : *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2009-2016*

Dari Tabel 1 dapat dilihat perbandingan tingkat resiko kredit macet antara Bank Umum Konvensional dan BPR Konvensional di Indonesia yang diukur dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL), dimana tingkat kesehatan bank dari rasio NPL ini adalah 5 persen, apabila nilai rasio NPL berada diatas 5 persen maka kondisi bank tersebut tidak stabil atau tidak sehat (Bank Indonesia). Dari tabel tersebut terlihat bahwasanya rata-rata nilai NPL dari tahun 2009-2016 pada BPR Konvensional lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Konvensional yaitu sebesar 5.51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi BPR Konvensional berada dalam kondisi tidak sehat. Sedangkan, dari

tahun 2009-2016 nilai NPL Bank Umum Konvensional adalah sebesar 2,88 persen, hal ini berarti kondisi Bank Umum Konvensional berada dalam kondisi sehat atau aman.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang perkreditan, BPR diharapkan dapat menunjang roda kegiatan usaha ekonomi skala kecil, terutama sektor ekonomi primer sebagai pangsa pasar utama dari BPR. Kehadiran BPR juga diharapkan dapat menghindarkan praktek pemerasan dari para rentenir terhadap pengusaha ekonomi golongan lemah karena proses dan persyaratan kredit BPR yang dirasa lebih mudah. Namun kemudahan yang ditawarkan BPR tersebut tidak selalu mendorong kesejahteraan BPR itu sendiri yang digambarkan dari nilai NPL-nya yang cukup tinggi.

Tabel 2 :
Nilai *Non Performing Loan* (NPL) Pada BPR Konvensional di Indonesia
Tahun 2009 - 2016

Tahun	NPL BPR Konvensional (%)
2009	6,90
2010	6,12
2011	5,22
2012	4,75
2013	4,45
2014	4,76
2015	5,40
2016	6,54

Sumber : Bank Indonesia tahun 2009 - 2016

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Non Performing Loan* (NPL) pada BPR Konvensional pada tahun 2009 - 2016 mengalami fluktuasi. Puncak nilai NPL BPR Konvensional tertinggi adalah sebesar 6.90 persen pada tahun 2009 melewati batas nilai ketetapan Bank Indonesia dalam melihat perbankan sehat yaitu 5 persen. Hal ini disebabkan karena tingkat suku bunga kredit BPR

Konvensional masih kurang bersaing dengan tingkat suku bunga kredit bank lain. Sementara nilai NPL BPR Konvensional terendah adalah sebesar 4.45 persen pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena BPR Konvensional menurunkan tingkat suku bunga kredit dan adanya kebijakan makroprudensial. Namun pada tahun 2015 dan 2016 nilai NPL BPR Konvensional di Indonesia kembali meningkat di atas 5 persen yaitu sebesar 6,54 persen pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena menurunnya kemampuan nasabah dalam mencicil kreditnya dan penyebab lainnya adalah karena analisa kredit dari AO BPR yang kurang bagus.

Menurut Fakhruddin dkk (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet adalah *Capital Adequacy Ratio*, suku bunga kredit, *Loan to Deposit Ratio*, GDP dan nilai tukar. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, suku bunga kredit, *Loan to Deposit Ratio*, GDP secara signifikan berpengaruh signifikan positif terhadap resiko kredit macet (NPL) dan nilai tukar berpengaruh signifikan negatif terhadap resiko macet (NPL).

Sedangkan menurut Hamh (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet adalah kebijakan makroprudensial seperti kebijakan *Loan to Value*, *Debt to Income*, dan *Buffer*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan *Loan to Value*, *Debt to Income* dan *Buffer* berpengaruh signifikan negatif terhadap resiko kredit macet (*Non Performing Loan*).

Pemantauan dan penilaian terhadap ketahanan sistem keuangan salah satunya dilakukan dengan kebijakan makroprudensial. Kebijakan

makroprudensial adalah kebijakan yang difokuskan pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dengan upaya untuk mencegah terjadinya resiko sistemik dalam sistem keuangan.

Bank BPR Konvensional dalam kegiatan usahanya memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan bertujuan untuk pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha secara normal. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan sebagai dana pembelian barang-barang modal usaha yang akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan kredit konsumsi merupakan jenis pinjaman yang diberikan oleh pihak BPR Konvensional dalam memenuhi kebutuhan konsumtif yang diperlukan, seperti membeli properti.

Tabel 3 :
Perkembangan Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan
Pada BPR Konvensional di Indonesia Tahun 2009-2016

Tahun	Modal Kerja (%)	Investasi (%)	Konsumsi (%)
2009	29,28	-14,59	15,55
2010	18,49	22,77	23,36
2011	16,48	22,56	26,79
2012	17,75	25,38	24,22
2013	16,82	17,20	20,89
2014	15,66	20,66	14,55
2015	7,49	16,78	10,27
2016	6,42	13,16	9,16
Rata-Rata	16,04	15,49	18,09

Sumber : Bank Indonesia tahun 2009-2016

Dari Tabel 3 dapat dilihat perbandingan pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada BPR Konvensional di Indonesia. Dari tabel tersebut terlihat bahwasanya rata-rata pertumbuhan

kredit konsumsi dari tahun 2009-2016 merupakan yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi. Dalam 8 tahun terakhir pertumbuhan kredit konsumsi yang tertinggi adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 26.79 persen, hal ini disebabkan oleh perekonomian yang kondusif sepanjang tahun 2011 dan yang terendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar 9.16 persen hal ini disebabkan oleh tingkat suku bunga kredit konsumsi yang masih tinggi dan rasio NPL yang masih tinggi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi maka bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit konsumsi, karena pertumbuhan kredit konsumsi yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan resiko kredit macet bagi bank. Hal ini karena pertumbuhan kredit konsumsi yang terlalu tinggi jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya sehingga dapat meningkatkan resiko kredit bagi bank. Untuk itu, agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk kredit konsumsi yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran *Loan to Value* (LTV) untuk kredit konsumsi. LTV merupakan angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit (Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10DPNP tanggal 15 Maret 2012).

Tabel 4 :
Ketentuan Kebijakan *Loan To Value* di Indonesia
Tahun 2012-2016

Kredit/ Pembiayaan dan Tipe Agunan	2012	2013			2015			2016		
	FK/ FP I (%)	FK/ FP I (%)	FK/ FP II (%)	FK/ FP III (%)	FK/ FP I (%)	FK/ FP II (%)	FK/ FP III (%)	FK/ FP I (%)	FK/ FP II (%)	FK/ FP III (%)
KPR Tipe > 70	70	70	60	50	80	70	60	80	70	60
KPRS Tipe >70		70	60	50	80	70	60	80	70	60
KPR Tipe 22-70		-	70	60	-	80	70	-	80	70
KPRS Tipe 22-70		80	70	60	90	80	70	90	80	70
KPRS Tipe s.d 21		-	70	60	-	80	70	-	80	70
KPR Ruko/KPR Rukan		-	70	60	-	80	70	-	80	70

Sumber : Bank Indonesia tahun 2012-2016

Keterangan :

FK/FP : Fasilitas Kredit / Fasilitas Pembiayaan

KPR : Kredit Pemilikan Rumah

KPRS : Kredit Pemilikan Rumah Susun

Pada tahun 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP mengenai kebijakan *Loan to Value* (LTV) dan *Down Payment*. Kebijakan LTV pada tahun 2012 hanya ditetapkan untuk fasilitas kredit pertama KPR tipe >70 m² yaitu sebesar 70 persen. Namun ternyata kebijakan LTV pada tahun 2012 ternyata masih belum menekan pertumbuhan KPR/KPRS. Pertumbuhan KPR/KPRS tipe >70 m² masih tinggi masing-masing mencapai 25,5 persen dan 63,3 persen di Juli 2013, jauh di atas pertumbuhan kredit secara agregat (Bank Indonesia). Pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak

mencerminkan harga sebenarnya sehingga dapat meningkatkan resiko kredit bagi bank-bank. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan ketentuan LTV dengan menentukan rasio LTV untuk tipe KPR dan KPRS 22-70 dan KPR Ruko. Dalam hal ini masyarakat dapat mengambil kredit atau pembiayaan properti dan kendaraan bermotor dengan uang muka yang lebih besar sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet atau NPL.

Pada tahun 2015 Bank Indonesia merevisi rasio LTV melalui Surat Edaran Bank Indonesia PBI No.17/10/PBI/2015. Bank diberikan kelonggaran memberikan kredit dengan uang muka yang lebih kecil dari sebelumnya. Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk bank yang memiliki nilai NPL dibawah 5 persen (Bank Indonesia). Sehingga kebijakan ini tidak berlaku untuk BPR Konvensional yang memiliki NPL diatas 5 persen. Selanjutnya, perubahan terakhir dari kebijakan LTV ini adalah pada tahun 2016 Bank Indonesia juga melonggarkan kebijakan LTV dan kebijakan ini berlaku untuk BPR Konvensional.

Dari Tabel 4 dapat dilihat perbandingan kebijakan LTV pada tahun 2012-2016. Pada tahun 2013 terjadi pengetatan kebijakan LTV. Hal ini berarti ketika kebijakan LTV diperketat seharusnya nilai NPL pada BPR Konvensional di Indonesia menurun. Namun, pada kenyataannya dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa nilai NPL pada BPR Konvensional di Indonesia terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 mencapai angka 6,54 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 ketika kebijakan LTV dilonggarkan seharusnya

diterapkan pada bank yang memiliki nilai NPL yang menurun, namun pada kenyataannya pelanggaran kebijakan LTV ini juga ditetapkan untuk BPR Konvensional yang memiliki resiko kredit macet yang meningkat. Hal ini menunjukkan adanya fenomena dari kebijakan LTV terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

Selanjutnya, dilihat dari penjelasan perkembangan NPL BPR Konvensional di Indonesia pada Tabel 2, bahwa suku bunga kredit konsumsi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena nilai NPL BPR Konvensional yang meningkat juga dikarenakan karena tingkat suku bunga kredit yang masih belum bersaing dengan bank-bank lainnya.

Tabel 5 :
Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumsi BPR Konvensional di Indonesia
Tahun 2009-2016

Tahun	Suku Bunga Kredit Konsumsi BPR (%)
2009	29.14
2010	27.81
2011	27.00
2012	25,97
2013	25,13
2014	25,50
2015	26.24
2016	25.44

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan tahun 2009-2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat perkembangan tingkat suku bunga kredit konsumsi oleh BPR Konvensional di Indonesia tahun 2009-2016, dimana dalam delapan tahun terakhir tingkat suku bunga kredit konsumsi yang diberikan oleh BPR Konvensional di Indonesia mengalami penurunan. Tingkat suku bunga kredit konsumsi tertinggi yang diberikan oleh BPR dalam

delapan tahun terakhir mencapai angka 29.14 persen yaitu pada tahun 2009. Sedangkan tingkat suku bunga kredit konsumsi terendah pada BPR adalah sebesar 25,13 persen pada tahun 2013. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia menurunkan tingkat BI Rate. Selanjutnya, pada tahun 2016 tingkat suku bunga kredit konsumsi BPR Konvensional mengalami penurunan yaitu sebesar 25,44 persen. Ketika suku bunga kredit konsumsi menurun maka seharusnya nilai NPL pada BPR Konvensional di Indonesia juga menurun. Namun, pada kenyataannya dapat dilihat dari Tabel 2 bahwa nilai NPL BPR Konvensional pada tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar sebesar 6,54 persen.

Suku bunga kredit konsumsi merupakan variabel moneter dimana kemungkinan akan turut mempengaruhi resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas uang. Kenaikan tingkat suku bunga kredit akan berdampak semakin besarnya beban yang harus ditanggung oleh penerima kredit, hal ini akan menyulitkan penerima kredit dalam membayar cicilannya sehingga akan timbul resiko kredit macet.

Dalam menghadapi resiko kredit macet, rasio modal memiliki peran yang sangat penting. Secara teori semakin besar rasio modal maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dimiliki bank. Besarnya rasio modal akan menggambarkan persentase minimum penyediaan dana atau rasio kecukupan modal yang diukur dari nilai *Capital Adequacy Ratio*, dimana tingkat kesehatan bank dari nilai CAR ini adalah 8 persen, apabila nilai CAR

berada dibawah 8 persen maka bank tersebut dalam kondisi tidak sehat (Bank Indonesia).

Tabel 6 :
Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada BPR Konvensional di Indonesia
Tahun 2009 - 2016

Tahun	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (%)
2009	24,17
2010	30,01
2011	28,68
2012	27,55
2013	28,48
2014	28,02
2015	28,99
2016	29,78

Sumber : Bank Indonesia tahun 2009 – 2016

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada BPR Konvensional di Indonesia mengalami fluktuasi. Nilai CAR tertinggi adalah pada tahun 2010 yaitu sebesar 30.01 persen. Sedangkan nilai CAR terendah adalah pada tahun 2009 yaitu sebesar 24.17 persen. Hal ini disebabkan karena nilai aset tertimbang menurut resiko (ATMR) meningkat namun tidak diikuti dengan pertumbuhan modal. Pada tahun 2012-2016 nilai CAR pada BPR terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 29.78 persen. Secara teori ketika nilai CAR meningkat, maka nilai NPL akan menurun. Namun dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa nilai NPL pada BPR Konvensional di Indonesia pada tahun 2012 terus meningkat hingga tahun 2016 yaitu sebesar 6.54 persen.

Kondisi ini memperlihatkan adanya fenomena pada variabel kebijakan *Loan to Value*, variabel suku bunga kredit konsumsi, dan variabel rasio modal

terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh kebijakan *Loan to Value* terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia?
2. Sejauhmana pengaruh suku bunga kredit konsumsi terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia?
3. Sejauhmana pengaruh rasio modal terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh kebijakan *Loan to Value*, suku bunga kredit konsumsi, dan rasio modal secara bersama-sama terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh kebijakan *Loan to Value* terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.
2. Pengaruh suku bunga kredit konsumsi terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

3. Pengaruh rasio modal terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.
4. Pengaruh kebijakan *Loan to Value*, suku bunga kredit konsumsi dan rasio modal terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini penulis berharap hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat oleh berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis diharapkan penelitian ini menjadi bahan studi dan literatur bagi mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang terutama jurusan Ilmu Ekonomi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan kebijakan makroprudensial di Indonesia.
3. Sebagai sumbangan bahan ilmiah dan penerapan ilmu-ilmu yang penulis peroleh selama kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S-1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Makroprudensial

Istilah makroprudensial pertama kali diperkenalkan pada pertemuan *The Cooke Committee* atau sekarang dikenal sebagai *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) pada tahun 1979. Istilah tersebut semakin populer pasca krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Istilah ini semakin populer pasca krisis keuangan global pada tahun 2008 dimana krisis yang bersumber dari *subprime mortgage* pada sektor perbankan Amerika Serikat memperburuk kinerja keuangan dan dampak negatif terhadap perkembangan indikator makroekonomi di beberapa negara (Simorangkir, 2014:425).

Tujuan dilaksanakannya kebijakan mikroprudensial dalam hal ini pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk membentuk fungsi perbankan Indonesia yang optimal dan sehat yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Kebijakan perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh atau secara individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Pada dasarnya fungsi stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menganalisis perkembangan dan menilai resiko-resiko serta merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk menciptakan sistem stabilitas keuangan yang stabil dan tangguh perlu dilakukan monitoring terhadap gejala-gejala yang dapat menimbulkan krisis termasuk melakukan proyeksi secara reguler apakah terdapat potensi resiko yang membahayakan. Secara umum, sumber instabilitas dapat dibagi menjadi dua yaitu resiko endogen dan resiko eksogen. Resiko eksogen yaitu resiko yang timbul di luar sektor keuangan, seperti gangguan karena ekonomi makro atau resiko kejadian seperti adanya bencana alam. Resiko endogen yaitu resiko yang berada di dalam sektor keuangan itu sendiri (misal perbankan) seperti resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Pemantauan dan penilaian terhadap ketahanan sistem keuangan dilakukan dengan pendekatan makroprudensial. Tujuan akhir dari kebijakan makroprudensial adalah menghindari guncangan makroekonomi atau penurunan GDP (Latumaerissa, 2013:51).

Dalam Simorangkir (2014:427), menurut IMF kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang menggunakan perangkat kehati-hatian sebagai perangkat utamanya untuk membatasi resiko sistemik atau resiko keuangan secara sistem luas. Pendekatan makroprudensial berdasarkan tujuannya adalah untuk membatasi resiko pada sistem keuangan guna mengurangi potensi menyebarnya dampak negatif (*cost*) pada perekonomian, sementara itu kebijakan makroprudensial bertujuan untuk membatasi resiko

pada individual institusi keuangan tanpa memperhatikan dampaknya pada makroekonomi. Dengan demikian ruang lingkup pendekatan makroprudensial adalah sistem keuangan secara keseluruhan. Indikator pengawasan makroprudensial antara lain adalah *bid ask bread* dalam pasar keuangan, harga properti, konsentrasi kredit properti, *loan to value* (LTV), kredit rumah tangga terhadap PDB, posisi devisa neto bank dan sebagainya.

Sementara itu, kompilasi indikator makroprudensial yang biasa digunakan dalam melakukan analisis stabilitas sistem keuangan. Indikator tersebut terdiri atas indikator utama dan indikator pendukung. Indikator utama terkait dengan institusi lembaga keuangan yang melakukan penarikan dana masyarakat melalui simpanan. Aspek-aspek yang perlu di monitor antara lain mencakup modal, aset, *earning*, *liquidity*, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Selain itu, indikator pendukung juga merupakan cerminan dari kondisi stabilitas sistem keuangan. Indikator tersebut mencakup sektor lembaga keuangan yang menyimpan dana masyarakat, lembaga keuangan non bank, lembaga keuangan non bank, lembaga non keuangan, rumah tangga, likuiditas pasar dan pasar *real estate* (properti). Harga dipasar properti atau lebarnya perbedaan (*spread*), harga beli dan harga jual di pasar valuta asing, menunjukkan kondisi stabilitas di pasar aset. Gejolak di kedua pasar tersebut dapat menimbulkan permasalahan serius dan mendasar yang dapat menciptakan krisis keuangan, sebagaimana pengalaman beberapa krisis keuangan yang lalu. Stabilitas harga di kedua pasar tersebut, perlu dijaga untuk mencegah terjadinya efek resiko sistemik sistem keuangan. Rasio dan

eksposur utang rumah tangga dan korporasi juga merupakan salah satu indikator yang perlu diawasi dan dikelola. Berbagai indikator tersebut menciptakan proses transmisi dan siklus yang saling berkaitan.

Dalam implementasinya, kerangka kebijakan makroprudensial di Indonesia dilaksanakan dalam 6 tahap. Secara umum, kerangka kebijakan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi resiko di dalam sistem keuangan yang berpotensi memiliki dampak sistemik, mengetahui bagaimana resiko tersebut menyebar dan melalui chanel apa penyebarannya, serta kapan saat yang tepat bagi otoritas untuk bereaksi dengan mengeluarkan instrumen kebijakan yang mampu mencegah penyebaran dampak resiko tersebut bagi sistem keuangan, makroekonomi, maupun sektor riil. Pelaksanaannya sebagaimana gambar berikut : pertama, *monitoring* terhadap indikator, kejadian dan atau perilaku yang dapat mempresentasikan potensi resiko dalam sistem keuangan. Kedua, identifikasi jenis-jenis resiko yang melekat pada sistem keuangan khususnya yang berpotensi menimbulkan dampak sistemik. Ketiga, penilaian resiko untuk mengetahui bagaimana resiko tersebut dapat menyebar, termasuk *channel* penyebarannya, serta mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan. Keempat, pemberian sinyal resiko baik baik kepada internal, termasuk otoritas sistem keuangan lainnya, maupun eksternal seperti publik, institusi keuangan dan pelaku pasar. Tahap pertama hingga tahap keempat merupakan elemen pertama kebijakan makroprudensial. Apabila pada tahap keempat pemberian sinyal resiko menunjukkan menunjukkan angka di bawah dan mendekati *threshold*, maka guna mencegah

meluasnya dampak sistemik pada sistem keuangan maupun dampak pada variabel makroekonomi, tahapan dilanjutkan pada elemen kedua yakni mengeluarkan instrumen kebijakan makroprudensial yang meliputi desain dan implementasi kebijakan (tahap kelima), serta evaluasi efektivitas kebijakan (tahap keenam). Sebaliknya, apabila pemberian sinyal resiko menunjukkan hasil jauh di bawah *threshold*, maka proses *macroprudencial surveillance* dapat dilanjutkan tanpa harus mengeluarkan instrumen kebijakan makroprudensial. Akan tetapi, apabila sinyal resiko menunjukkan angka jauh melewati *threshold*, maka kondisi ini mengindikasikan perlu diaktifkannya *Crisis Management Protocols* (CMP).

2. Konsep Perbankan

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 10 tahun 1998 (Kasmir, 2014:14) :

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
- b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Untung (2000:14) di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan Tahun 1992, yaitu bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- d. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga.
- e. Mempermudah lalu lintas pembayaran uang.
- f. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara belum digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-lain.

- g. Menciptakan kredit, yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (yaitu deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan) dari kelebihan cadangannya.

2.2 Pengertian dan Fungsi BPR

Landasan hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Pengertian lain tentang Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan (Latumaerissa, 2011:300).

Dalam Budisantoso (2006:9) menyatakan bahwa kegiatan- kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR secara lengkap adalah:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain

Menurut Latumaerissa (2011:300) fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T yaitu tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana dan sangat mengerti kebutuhan nasabah. Selain itu peran BPR juga untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang serupa dan memberikan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi. Adapun kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR antara lain :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha peransuransian dan,

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR.

2.3 Pengertian dan Fungsi Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan (Untung, 2000:4).

Kredit dalam perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

e. Meningkatkan kegairahan berwirausaha.

3. Resiko Kredit Macet (*Non Performing Loan*)

Menurut Janvislo dkk (2013) resiko kredit macet merupakan penyebab utama masalah pada sistem perbankan krisis keuangan. Hal ini dikarenakan resiko kredit macet berdampak pada pengurangan modal yang berarti bahwa modal sendiri dari bank digunakan untuk mebiayai aktiva yang mengandung resiko. Resiko kredit dapat di indikator oleh *Non Performing Loan*, dimana *Non Performing Loan* memperlihatkan kondisi kinerja perbankan dan menilai kondisi kesehatan bank tersebut. Nilai NPL untuk bank yang sehat yaitu 5 persen yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, jika lebih dari 5 persen maka dikatakan bank tersebut tidak sehat atau dalam kondisi buruk. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, besarnya nilai NPL suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \quad (1)$$

Menurut Ismail (2011:124) faktor-faktor penyebab kredit macet dilihat dari dua sisi, pertama dilihat dari faktor intern bank dimana analisis kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Kedua dilihat dari sisi faktor ekstern bank dimana unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah, unsur ketidaksengajaan dan Force Majeur dimana perubahan-perubahan yang

terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya, akibatnya perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh pesat pada usaha debitur. Krisis debitur tersebut dapat meningkatkan resiko kredit macet dan dapat mengakibatkan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai yang menurun terhadap mata uang asing dan harga-harga naik sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dari teori yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kredit macet disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern bank yang terjadi di dalam bank tersebut, faktor ekstern terjadi pada luar bank tersebut seperti variabel makroekonomi.

Menurut Fakhruddin dkk (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet adalah *Capital Adequacy Ratio*, suku bunga kredit, *Loan to Deposit Ratio*, GDP dan nilai tukar. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, suku bunga kredit, *Loan to Deposit Ratio*, GDP secara signifikan berpengaruh positif terhadap resiko kredit macet (NPL) dan nilai tukar berpengaruh signifikan negatif terhadap resiko macet (NPL).

Peningkatan modal yang tidak diikuti dengan peningkatan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) akan menyebabkan perbankan kesulitan dalam mengantisipasi resiko yang ditimbulkan oleh aktivitas kredit yang menyebabkan peningkatan NPL. Sehingga ketika CAR meningkat tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan ATMR maka akan terjadi peningkatan resiko kredit yang menyebabkan meningkatnya resiko kredit bermasalah. Selain itu meningkatnya LDR tentunya karena penyaluran kredit. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbankan telah memiliki sistem pengawasan yang

cukup baik terutama dalam penilaian nasabah, sehingga meningkatkan kualitas kredit meskipun cenderung selektif namun hal tersebut akan mendorong penurunan rasio kredit bermasalah.

Selanjutnya, GDP juga berpengaruh terhadap resiko kredit macet. Hal ini sesuai dengan teori secara umum dimana saat tingkat pertumbuhan GDP meningkat maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pula kapasitas bagi peminjam dana atau debitur untuk mengembalikan pinjamannya dan menurunkan resiko kredit macet. Terakhir, meningkatnya suku bunga kredit akan mendorong jumlah pembayaran kredit yang harus segera dibayarkan menjadi semakin tinggi sehingga akan meningkatkan resiko kredit macet.

Sedangkan menurut Hamh (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kredit macet adalah kebijakan makroprudensial seperti kebijakan *Loan to Value*, *Debt to Income*, dan *Buffer*. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan *Loan to Value*, *Debt to Income* dan *Buffer* berpengaruh signifikan negatif terhadap resiko kredit macet (NPL).

Menurut Kohn (2006) dalam jurnal Hamh (2012) kebijakan ini diantaranya adalah *countercyclical capital* dan *dynamic loan loss provisioning*. Kebijakan ini akan mengakibatkan peningkatan biaya penyediaan modal pada periode *boom* dan berimplikasi terhadap peningkatan biaya penyaluran kredit. Demikian pula dengan kebijakan *dynamic loan loss provisioning*, kebijakan ini mewajibkan peningkatan buffer yang berbentuk eserve ketika periode

boom sehingga kebijakan tersebut termasuk ke dalam kategori kebijakan terkait pasar modal dan likuiditas. Kebijakan terkait pasar modal dan likuiditas bersifat *countercyclical* dapat mengurangi pergerakan berlebihan dari siklus kredit sehingga mengurangi akumulasi resiko sistemik. Kemudian kebijakan LTV akan menempatkan peminjam marginal di luar kelompok yang memiliki akses ke perbankan. Kebijakan LTV juga melindungi bank dengan meningkatkan jumlah kolateral yang akan menurunkan resiko kredit macet.

Menurut Untung (2000:145) upaya pencegahan kredit bermasalah harus memiliki kebijakan yang baik, yaitu :

1. Kebijaksanaan pokok penyaluran kredit yang sehat

Kebijaksanaan pokok penyaluran kredit yang sehat harus dinyatakan secara tertulis oleh setiap bank. Kebijaksanaan pokok perkreditan harus jelas sehingga mudah dimengerti, ringkas dan padat.

2. Sumber daya manusia yang solid dalam bidang perkreditan

Agar dapat menerapkan azas manajemen yang sehat, bank harus mempunyai sumber daya manusia yang sehat, baik mengenai pendidikan maupun moralnya. Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sektor perbankan sangatlah penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia.

3. Kebijaksanaan persetujuan kredit

Persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat bilamana diberikan berdasarkan hasil dari penilaian total aset permintaan kredit dan atas diri debitur.

Menurut Silvanita (2009:126), resiko kredit macet dapat dikompensasi dengan berbagai cara antara lain :

- a. Memberikan suku bunga yang tinggi.
- b. Mensyaratkan asuransi jaminan kredit.

Dampak kredit bermasalah pada bank yaitu (Ismail, 2011:125) :

1) Laba/rugi bank menurun

Penurunan laba akibat adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

2) Bad Dabt Ratio menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

3) Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

4) ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena Return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

Dari pembahasan dipaparkan dapat disimpulkan bahwa dari point pertama sampai keempat bentuk dampak dari kredit bermasalah yang harus cepat diantisipasi. Ada beberapa langkah dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara 3R (Ismail, 2011:126) :

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu yang meliputi :

- a. Perubahan Grace Period
- b. Perubahan jadwal pembayaran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan jumlah angsuran

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit yang meliputi *Rescheduling* atau :

- a. Perubahan tingkat suku bunga atau denda
- b. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga
- c. Keringanan bunga atau denda
- d. Perubahan kepemilikan
- e. Perubahan nama atau status perusahaan
- f. Perubahan agunan

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning* atau :

- a. Penambahan dana bank (suplesi kredit)
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- c. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya.

- d. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Dalam pembahasan dipaparkan dapat disimpulkan bahwa ketiga cara tersebut dapat menangani kredit bermasalah mulai dari penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

4. Pengaruh Kebijakan *Loan To Value* Terhadap Resiko Kredit Macet

Menurut Simorangkir (2014:436) sejak bulan Juni 2012 Bank Indonesia mulai mengimplementasikan kebijakan mengenai penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Tujuan dari kebijakan ini adalah dalam rangka meredam resiko sistemik yang mungkin timbul akibat pertumbuhan KPR yang pada saat itu mencapai lebih 40 %, serta tingkat kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang pada saat itu mencapai hampir 10 %. Dari sudut makroprudensial dengan pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak menggambarkan harga sebenarnya, sehingga dapat meningkatkan resiko kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar.

Berdasarkan kebijakan tersebut, ketentuan utamanya adalah nilai maksimal LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan luas >70m² adalah 70 persen, dikecualikan untuk KPR dalam rangka program perumahan pemerintah. Sementara *down payment* (DP) untuk kredit kendaraan bermotor adalah sebesar 20 persen hingga 30 persen. Selanjutnya, pada bulan September 2013 Bank Indonesia melakukan *redeseign* atas kebijakan

tersebut melalui Surat Edaran No. 15/40/DKMP mengenai penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit atau pembiayaan konsumsi beragun properti, kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam surat edaran tersebut, pokok-pokok penyesuaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain menggabungkan pengaturan untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah pada surat edaran yang sama, KPR untuk rumah tipe 22m² – 70m² yang sebelumnya dikecualikan, saat ini menjadi objek perhitungan LTV untuk KPR kedua serta perhitungan LTV dilakukan secara progresif.

Loan to value merupakan angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit (Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012). Pada tahun 2015 Bank Indonesia merevisi rasio *Loan to Value* melalui Surat Edaran Bank Indonesia PBI No.17/10/PBI/2015. Bank diberikan kelonggaran memberikan kredit dengan uang muka yang lebih kecil dari sebelumnya. Namun kebijakan ini hanya berlaku untuk bank yang memiliki nilai NPL dibawah 5 persen (Bank Indonesia). Selanjutnya, perubahan terakhir dari kebijakan LTV ini adalah pada tahun 2016 Bank Indonesia juga melonggarkan kebijakan LTV dan kebijakan ini berlaku untuk bank memiliki nilai NPL dibawah 5 persen (Bank Indonesia).

Kebijakan *Loan to Value* juga menghindari peminjam melakukan bahaya moral. Pinjaman hipotik dikatakan “*conventional*” atau “*conforming*”, bila rasio LTV sama dengan 80 persen atau leebih kecil.

Secara umum, semakin besar rasio *loan to value* maka semakin besar resiko *default*, yaitu resiko peminjam tidak melanjutkan pinjamannya (Silvanita, 2009:125).

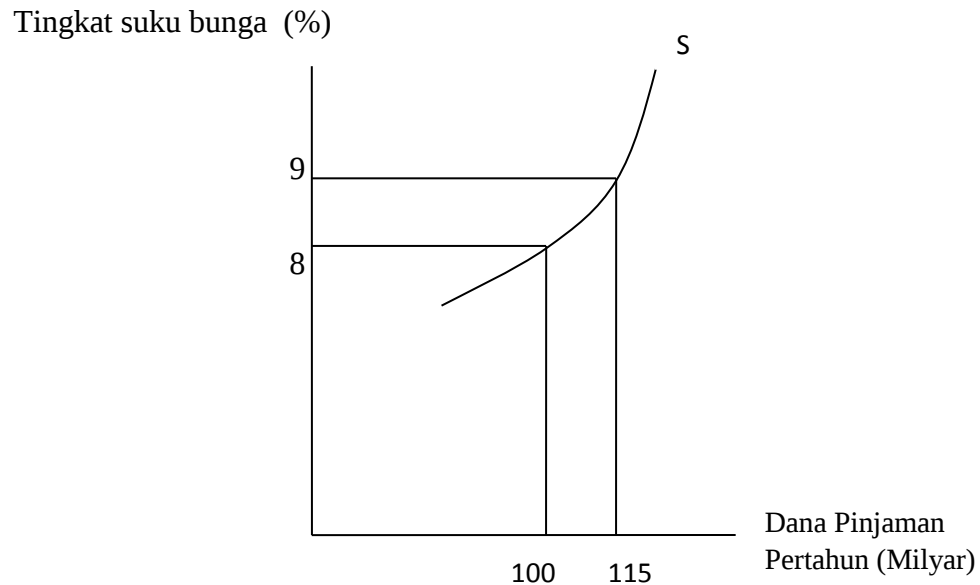
Menurut Hamh (2012) menyatakan bahwa kebijakan makroprudensial dapat membatasi pertumbuhan kredit yang *booming* dan dapat mengurangi resiko kredit macet. Kebijakan LTV untuk masyarakat menengah ke atas, ketentuan ini mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan. Lain hal nya dengan masyarakat menengah ke bawah, hasil ini memberatkan masyarakat yang baru ingin membeli rumah pertama karena hanya mengumpulkan uang muka yang lebih sedikit. Dengan diberlakukannya ketentuan pengetatan rasio *loan to value* ini akan menurunkan pertumbuhan kredit diatas agregat dan mengurangi resiko kredit macet. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan LTV berpengaruh negatif terhadap resiko kredit macet (*non performing loan*).

5. Pengaruh Suku Bunga Kredit Konsumsi Terhadap Resiko Kredit Macet

Teori preferensi likuiditas yang dikemukakan Keynes menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas (*opportunity cost*) dari memegang uang. Tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas uang (Mankiw, 2006:287).

Dalam pasar kredit, penawaran kredit ditentukan oleh jumlah kredit dan harga dari kredit yaitu tingkat suku bunga seperti yang terlihat pada kurva

berikut. Dari Gambar 2 dibawah ini dapat dilihat kurva penawaran kredit bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya dari kiri atas ke kanan bawah. Berdasarkan kondisi tersebut maka kurva penawaran kredit memiliki kemiringan/*slope* positif. Maka apabila tingkat suku bunga rendah maka jumlah dana pinjaman yang ditawarkan juga semakin rendah. Ketika penawaran kredit menurun maka akan menyebabkan pertumbuhan kredit yang menurun dan meningkatkan resiko kredit macet.



Gambar 1 : Kurva Penawaran Kredit

Sumber : Sukirno (2016)

Menurut Sukirno (2016), pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Berarti tingkat bunga adalah persentase pembayaran modal yang dipinjam dari lain pihak. Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank adalah harga yang harus dibayar

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman).

Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil. Menurut kaum klasik tingkat bunga ditentukan oleh:

1. Penawaran tabungan oleh rumah tangga
2. Permintaan dana tabungan oleh investor

Suku bunga adalah harga pinjaman. Suku bunga melambangkan jumlah yang dibayar pihak peminjam untuk pinjaman dan jumlah yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman dari tabungannya. Karena suku bunga yang tinggi membuat peminjam uang semakin mahal, jumlah dana pinjaman yang diminta jatuh seiring dengan naiknya suku bunga. Begitupun juga, karena suku bunga tinggi, membuat penyimpan uang semakin menarik jumlah dana pinjaman yang ditawarkan naik seiring dengan naiknya suku bunga (Mankiw, 2013:93).

Penyesuaian suku bunga pada titik keseimbangan terjadi karena alasan yang sangat umum. Jika suku bunga lebih rendah dari titik keseimbangan, jumlah dana pinjaman yang ditawarkan lebih sedikit dari pada jumlah dana

pinjaman yang diminta. Kekurangan dana pinjaman yang diakibatkan oleh suku bunga rendah ini akan mendorong pihak pemberi pinjaman untuk menaikkan suku bunga yang mereka pasang. Suku bunga yang tinggi akan mendorong penyimpanan uang karenanya mengurangi jumlah dana yang diminta. Sebaliknya, jika suku bunga lebih tinggi dari pada titik keseimbangan ,jumlah dana pinjaman yang ditawarkan akan melampaui jumlah dana pinjaman yang diminta. Ketika pihak pemberi pinjaman memperebutkan para peminjaman yang langka, suku bunga akan terdorong turun. Dengan demikian suku bunga akan mendekati titik keseimbangan dimana permintaan dan penawaran dana pinjaman benar-benar seimbang (Mankiw, 2006:293).

Menurut Mishkin (2008:50) masalah yang ditimbulkan oleh informasi asimetris sevelum transaksi terjadi disebut *adverse selection*, dimana dalam pasar keuangan terjadi ketika peminjam potensial yang memungkinkan besar membuahkan hasil yang tidak diinginkan yaitu resiko kredit yang buruk. Komponen-komponen sisi permintaan dan penawaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat suku bunga, tingkat keuntungan perusahaan, pertumbuhan pendapatan dan nilai tukar.

Selanjutnya, menurut Fakhruddin (2016) dalam jurnal yang berjudul Analisis Variabel Makro dan Rasio Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah menyatakan bahwa suku bunga kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap rasio *Non Performing Loan* (NPL). Tingkat suku bunga kredit merupakan variabel yang dominan dalam mempengaruhi rasio *Non Performing Loan* (NPL). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga

kredit memiliki pengaruh yang kuat penyebab meningkatnya *rasio Non Performing Loan* (NPL). Hal ini dikarenakan suku bunga kredit akan mendorong jumlah pembayaran kredit yang harus segera dibayarkan menjadi semakin tinggi sehingga akan meningkatkan resiko kredit macet.

Menurut Firdaus (2013) dalam jurnal Fakhruddin (2016) suku bunga bagi suatu bank adalah harga dari komoditi yang diperjual belikan oleh bank. Di Indonesia penentuan suku bunga, baik biaya dana maupun bunga kredit mengacu pada suku bunga kredit. Suku bunga kredit juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Industri perbankan sangat kompetitif, kebijakan penentuan suku bunga kredit pada bank merupakan alat persaingan yang strategis. Kenaikan suku bunga kredit yang diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit bank menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah sebab beban bunga yang harus ditanggung debitur akan semakin berat. Tetapi kenaikan suku bunga kredit tidak serta merta direspons oleh perbankan dengan menaikkan suku bunga kredit karena kebijakan suku bunga kredit merupakan sistem moneter sehingga dampaknya tidak secara langsung dirasakan oleh perbankan dan membutuhkan time lag tertentu.

Dengan demikian tingkat suku bunga kredit merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh penabung di Bank atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham. Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit maka keinginan orang untuk meminjam dana akan semakin kecil karena biaya penggunaan dana yang besar, dan pertumbuhan kredit akan menurun.

Ketika pertumbuhan kredit menurun maka resiko kredit macet akan semakin meningkat. Jadi, suku bunga kredit konsumsi berpengaruh positif terhadap resiko kredit (*Non Performing Loan*).

6. Pengaruh Rasio Modal Terhadap Resiko Kredit Macet

Ikatan Bankir Indonesia (2013:176) menyatakan bahwa rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Sesuai dengan SE BI No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8 persen.

Perhitungan penyediaan modal bank umum didasarkan pada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Modal sendiri adalah total modal yang berasal dari perusahaan (bank) yang terdiri dari modal disetor, laba tak dibagi dan cadangan yang dibentuk oleh bank. Sedangkan ATMR adalah merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif. ATMR ini menunjukkan nilai aktiva beresiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup (Arthesa, 2006:147).

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut (Herman, 2012: 98) :

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masingpos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
3. Total ATMR= ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100 \% \quad (2)$$

Semakin tinggi rasio modal maka semakin banik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yangn beresiko. Sebuah bank mengalami resiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8 persen.

Menurut Kusuma dkk (2016) dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Kinerja Bank (CAR,ROA,BOPO dan LDR), Serta Pertumbuhan Kredit dan Kualitas Kredit Terhadap *Non Performing Loan* (NPL) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap NPL. Hal tersebut terjadi sesuai dengan teori intermediasi perbankan, bahwa dengan CAR yang tinggi, bank akan dinilai

mampu untuk terus menjalankan kegiatan operasionalnya, dimana masyarakat percaya bahwa dana yang mereka berikan akan dimanfaatkan dengan baik dan dana tersebut dapat mereka ambil kembali pada saat yang telah disepakati. Atas kepercayaan masyarakat inilah bank dapat menghimpun banyak dana yang kemudian akan tersalurkan dalam bentuk kredit. Semakin banyak kredit yang berhasil disalurkan, maka rasio NPL kemudian dapat menurun.

B. Penelitian Relevan

Hasil penelitian sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat/hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin (2016) dengan judul Analisis Variabel Makro dan Rasio Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), suku bunga kredit, *Loan to Deposit Ratio* dan GDP secara signifikan berpengaruh positif terhadap rasio *Non Performing Loan*, sedangkan variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap rasio *Non Performing Loan*. Diantara variabel independen variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi rasio NPL adalah tingkat suku bunga kredit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit memiliki pengaruh yang kuat penyebab meningkatnya rasio NPL. Persamaan dengan penelitian ini adalah merujuk pada variabel dependennya yang sama-sama menggunakan variabel resiko kredit macet/bermasalah.

Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan variabel independennya menggunakan variabel *Loan to Deposit Ratio*, GDP dan nilai tukar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Variabel Kinerja Bank (CAR, ROA, BOPO LDR), Pertumbuhan Kredit dan Kualitas Kredit Terhadap *Non Performing Loan*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset* (ROA) dan BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai NPL, tingkat kualitas kredit (*loan loss provision*) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai NPL, dan variabel pertumbuhan kredit dan *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah merujuk pada variabel dependennya yang sama-sama menggunakan variabel resiko kredit macet/bermasalah. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana penelitiannya hanya pada 12 bank konvensional dan variabel independennya menggunakan variabel pertumbuhan kredit dan kualitas kredit.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamh dkk (2012) dengan judul *Macroprudential Policies in Open Emerging Economies*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial dapat membatasi pertumbuhan kredit yang berlebihan selama fase *booming* dan kebijakan makroprudensial seperti *Loan to Value*, *Debt to Income* dan *Buffer* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap resiko kredit macet.

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel independennya yang menggunakan kebijakan *Loan to Value*. Sedangkan, perbedaannya adalah alat analisis yang digunakan dan penelitiannya tidak menggunakan variabel CAR serta suku bunga kredit konsumsi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Messai (2013) dengan judul *Micro and Macro Determinants of Non Performing Loans*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan *Return On Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap kredit macet, sedangkan tingkat pengangguran dan tingkat suku bunga riil berpengaruh positif terhadap resiko kredit macet. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel dependen yang digunakan adalah resiko kredit macet. Sedangkan, perbedaannya terletak pada penelitiannya yang menggunakan variabel pengangguran, ROA, dan pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel terikatnya adalah resiko kredit macet dan variabel bebasnya adalah kebijakan LTV, suku bunga kredit konsumsi, dan rasio modal. Untuk dapat mengetahui arah dari penelitian yang diteliti, maka perlu adanya suatu kerangka pemikiran, sehingga dengan kerangka tersebut dapat mempermudah mengetahui isi dari penelitian.

Resiko kredit macet pada BPR di Indonesia merupakan resiko yang terjadi ketika debitur tidak melakukan pembayaran kredit sesuai

dengan kesepakatan. Resiko kredit macet sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yaitu kebijakan *Loan to Value* (D1), suku bunga kredit konsumsi (X1), dan rasio modal (X2).

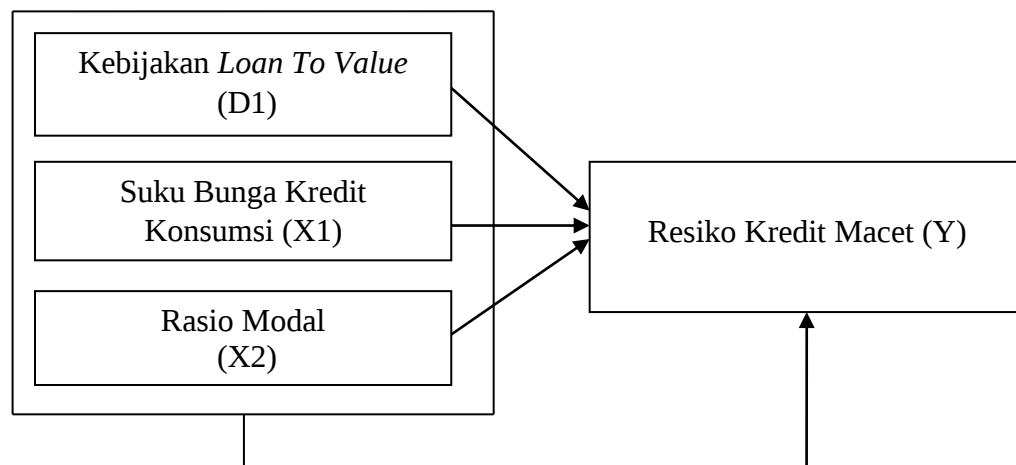
Kebijakan *Loan to Value* merupakan kebijakan pembatasan penyaluran kredit properti. Apabila rasio kebijakan *Loan to Value* diperketat maka resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia akan semakin kecil dan sebaliknya apabila rasio kebijakan *Loan to Value* dilonggarkan maka resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia juga akan semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin besar kebijakan *Loan to Value* maka uang muka/dp yang dibayarkan si peminjam akan semakin sedikit, sehingga peluang resiko kredit macet akan lebih besar.

Suku bunga kredit konsumsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi resiko kredit macet pada BPR di Indonesia. Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit konsumsi maka resiko kredit macet pada BPR Konvensional akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga kredit konsumsi maka resiko kredit macet pada BPR Konvensional akan menurun. Hal ini dikarenakan bunga yang tinggi menyebabkan semakin tinggi juga beban yang harus ditanggung oleh peminjam sehingga resiko kredit macet yang akan terjadi lebih tinggi.

Rasio modal adalah kemampuan suatu bank dalam mengukur modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Rasio modal dihitung dengan menggunakan indikator CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk

menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko yang berarti semakin besar *Capital Adequacy Ratio* maka rasio resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya semakin kecil *Capital Adequacy Ratio* maka akan semakin besar resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

Secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut :



Gambar 2 : Kerangka Konseptual Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Resiko Kredit Macet Pada BPR Konvensional di Indonesia

D. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ditemukan di atas dan mengacu pada kajian teori dan kerangka konseptual , maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan *Loan to Value* terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga kredit konsumsi terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio modal terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan *Loan to Value*, suku bunga kredit konsumsi dan rasio modal secara bersama-sama terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menjelaskan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara kebijakan *loan to value* terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Artinya semakin meningkat kebijakan *loan to value* yang ditetapkan maka akan berdampak pada semakin tingginya resiko kredit pada BPR Konvensional di Indonesia.
2. Hasil pengujian menjelaskan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara suku bunga kredit konsumsi BPR Konvensional terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Artinya semakin meningkat suku bunga kredit konsumsi yang ditetapkan maka akan berdampak semakin tinggi resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.
3. Hasil pengujian menjelaskan secara parsial terdapat pengaruh yang positif signifikan antara rasio modal BPR Konvensional terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Artinya semakin meningkat rasio modal pada BPR Konvensional maka akan berdampak semakin tingginya resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

4. Hasil pengujian menjelaskan bahwa secara bersama-sama kebijakan *loan to value*, suku bunga kredit konsumsi dan rasio modal berpengaruh signifikan terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu kebijakan *loan to value*, suku bunga kredit konsumsi dan rasio modal secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas yang berasal dari dalam BPR Konvensional, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan variabel maupun indikator lain yang dapat mempengaruhi resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.
2. Bank Indonesia sebaiknya menurunkan kebijakan LTV yang ditetapkan untuk BPR Konvensional agar semakin besar dp/uang muka yang dibayarkan si peminjam sehingga menurunkan resiko kredit macet. Selain itu Bank Indonesia juga perlu membuat kebijakan yang dikhususkan untuk tipe rumah tertentu untuk menjaga kondisi bisnis properti dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak BPR Konvensional agar menurunkan tingkat suku bunga kredit konsumsi yang ditetapkan agar lebih bersaing dibandingkan bank-bank lain, sehingga masyarakat lebih berminat untuk melakukan pinjaman

pada BPR Konvensional dan mendorong pertumbuhan kredit yang selanjutnya mengurangi resiko kredit macet pada BPR Konvensional di Indonesia.

4. Bagi pihak BPR Konvensional agar meningkatkan kualitasnya dalam penambahan modal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengusahakan setiap aset yang beresiko menghasilkan pendapatan, sehingga tidak perlu menekan permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade dan Edila Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Indeks
- Bank Indonesia. 2001. *Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2012. *Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Resiko Pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2013. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP Perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2015. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 Perihal Rasio Loan to Value dan Rasio Financing to value Untu Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2016. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Perihal Rasio Loan to Value dan Rasio Financing to value Untu Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Jakarta : Bank Indonesia
- Budisantoso, Totok dan Trindaru Sigit. 2006/2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Kedua*. Jakarta : Salemba Empat
- Fakhruddin, Muhammad Rahmadi Yusuf. 2016. Analisis Variabel Makro dan rasio Keuangan Terhadap Kredit Bermasalah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 2*. ISSN : 2442-7411
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. The Mc.Graw-Hill Companies
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Halim, M. 2015. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* Di Bank Pemerintah dan Bank Swasta Jawa Timur Periode 2008-2012. *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*